

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi dan mengakui hak asasi manusia sebagai hak dasar atau hak yang bersifat kodrati. Oleh karena itu, penegakan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia kerap disuarakan di Indonesia dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan keadilan bagi warga negara.

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dan dimiliki oleh setiap manusia dilahirkan sampai dia mati, hak asasi ini dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali hal ini mendorong bagi setiap individu untuk mendapatkan dan melaksanakan hak tersebut.² Sebagai hak dasar, hak asasi manusia memiliki ruang lingkup yang sangat luas di antara lain hak politik atau dikenal dengan *political right*.

Hak politik dalam hal ini pendidikan politik, diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia telah menerangkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Hal ini dijelaskan secara jelas dalam Pasal 23 Ayat (1), serta Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan tempat atau ruang yang selebar-lebarnya bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam proses politik di negara Indonesia baik hak untuk memilih ataupun hak untuk dipilih serta hak untuk bergabung dan mendirikan partai politik.³

Penegakan dan perlindungan tentang hak asasi manusia di Indonesia sangatlah penting bagi rakyatnya, karena hak asasi manusia berkaitan dengan harkat dan martabat manusia sebagai

² Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, (Cornell University Press, Ithaca and London, 2003), hal. 7-210

³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

manusia seutuhnya. Hak asasi manusia di Indonesia sangat berhubungan berat dengan landasan negara Indonesia yaitu Pancasila, yang mana tercantum dalam sila ke-dua. Hak asasi manusia di negara Indonesia sangat dijunjung tinggi, karena merupakan salah satu ciri dari negara Indonesia sebagai negara hukum yang selalu menjaga harkat dan martabat dari rakyat Indonesia.⁴

Partai politik mempunyai tugas utama, yaitu memberikan pemahaman yang benar tentang berpolitik yang didasari dengan transparansi terkait personal calon yang akan masyarakat pilih pada pemilu. Tidak itu saja, dalam pemahaman mengenai partai politik, hal yang paling penting dalam memahaminya adalah partai mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat terkhusus yang usianya telah dinyatakan sebagai calon daftar pemilih agar ikut andil dalam melakukan proses pemilihan umum. Kemudian memahami pula akan artinya suara mereka yang akan merubah nasib untuk beberapa dekade tentu saja dengan pengharapandapat memunculkan masyarakat-masyarakat yang bersifat partisipan.

Peran partai politik dalam pendidikan politik juga dapat dilaksanakan antara lain berpartisipasi secara aktif dan kreatif sadar akan hak dan kewajiban yang ditanggung oleh anggota partai politik dan sebagai warga negara. Dengan demikian pendidikan politik akan menjadi sarana agar terpeliharanya stabilitas politik nasional sebagai usaha memperlancar cita-cita bangsa.

Satu kelompok masyarakat yang ikut serta juga pada pemilu yaitu pemilih lansia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13

⁴ Lilis Eka Lestari, Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 5 No. 2, Agustus 2019. hal 19

Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia, lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas, baik pria maupun wanita.⁵ Pemilih lansia merupakan pemilih yang cukup mendukung dalam perolehan suara dalam pemilu. Karakteristik perilaku pemilih lansia cenderung masih sangat labil dan apatis, pengetahuan politiknya kurang karena mereka pada usia lanjut cenderung tidak memikirkan dalam hal pemilu sebagai pemilih dalam kontestasi politik pemilu.

Partai politik sudah sewajibnya menjalankan tugasnya dalam hal pendidikan politik, karena dalam AD jika sebuah partai politik tidak menjalankan program kerja ini maka partai politik akan mendapatkan denda administratif berbentuk penolakan untuk mendaftarkan sebagai partai politik, hal tersebut sudah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 karena mereka tidak memberikan pendidikan politik bagi para pendukungnya dan masyarakat umum.⁶

Pemilih lansia di Tulungagung menyumbang suara yang cukup besar, hal ini dibuktikan dengan data pada pemilu 2024 dimana total pemilih *pre boomer* atau orang yang lahir sebelum tahun 1945 mencapai 24.785 orang, dari total 858.803 daftar pemilih tetap Kabupaten Tulungagung berarti mencapai 2,9 persen adalah pemilih lansia.⁷ Data ini seharusnya menjadi perhatian lebih mengingat pada usia seperti ini kalangan pemilih lansia cukup mendukung dalam perolehan suara.

⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia

⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

⁷ Hamdan Defa Setiawan, Pemilu 2024, Pemilih Lansia di Tulungagung Capai 24.785 Orang, <https://tulungagung.jatimnetwork.com/tulungagung/7399704391/pemilu-2024-pemilih-lansia-di-tulungagung-capai-24785-orang>, di akses tanggal 15 November 2024

Indonesia yang menganut sistem demokrasi sudah semestinya membuka ruang yang lebar bagi masyarakat tanpa terkecuali untuk menciptakan sistem pemerintahan yang ideal.⁸ Karena hak politik menjadi satu rangkaian yang dimiliki oleh setiap warga negara tanpa terkecuali, hal ini memiliki arti penting bagi keberlangsungan dari perlindungan hak asasi manusia dalam sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia.

Partisipasi politik masyarakat menjadi tolak ukur demokrasi di Indonesia baik dalam proses memilih maupun dipilih, dengan partisipasi yang baik masyarakat akan mempunyai andil dalam memecahkan persoalan yang ada dan memungkinkan akan mengantarkan kepada perubahan yang lebih baik.⁹ Pendidikan politik merupakan upaya dalam memperdalam pemahaman politik baik individu maupun suatu komunitas. Untuk membangun masyarakat yang demokratis terhadap proses politik dan responsif terhadap problematika yang terjadi.

Melalui pendidikan politik ini masyarakat diharap mampu dan dapat memahami cara kerja dan kinerja pemerintah dan bagaimana pilihan politik diambil. Pendidikan politik turut membantu masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang kebebasan dan komitmen warga agar lebih dinamis dalam dukungan politik di Indonesia.

Dalam pendidikan politik penting juga ditanam sebuah pemahaman dalam pengambilan keputusan untuk mengatur rancangan kekuasaan agar lebih mudah menjamin berfungsinya sistem check and keseimbangan antara organisasi-organisasi politik, pendidikan politik ini dapat dilakukan oleh siapa saja, bagi siapa saja. Bahkan bagi masyarakat lansia sekalipun karena mereka mempunyai hak yang sama, karena tujuan dari

⁸ Djoko Sumanto, Amelia Haryanti, *Pendidikan Politik*, (Pamulang: UNPAM Press, 2021), hal 13.

⁹ *Ibid.*, hal 29-30.

pendidikan politik adalah membentuk kepribadian politik, kesadaran politik, dan partisipasi politik bagi warga negara. Hal ini akan berpengaruh pada tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses politik.¹⁰

Logika yang digunakan adalah semakin tinggi intensitas partisipasi politik warga di sebuah negara maka dikatakan demokratis negara tersebut. Di lain sisi partisipasi politik diartikan sebagai upaya-upaya dalam mendukung kandidat atau memenangkan kontestasi dalam pemilu.¹¹ Partisipasi politik adalah aspek yang begitu penting untuk sebuah tatanan negara demokrasi. Sebagian besar warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana lebih cenderung kurang diperhitungkan dalam proses politik.¹² Terlebih lagi pada masyarakat lansia dengan keadaan mereka yang minoritas seringkali diabaikan.

Salah satu partai besar di Indonesia adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sebuah partai politik di berideologi moderat. Partai ini didirikan oleh Presiden Indonesia ke-4 Abdurrahman Wahid di Jakarta pada 23 Juli 1998 (29 *Rabī'ul Awwāl* 1419 *hijriyyah* yang mendapat dukungan kuat dari kiai-kiai Nahdlatul Ulama, seperti Munasir Ali, Ilyas Ruhiat, Mustofa Bisri dan Muchith Muzadi.¹³

Dengan kedudukannya sebagai salah satu partai besar menjadikan PKB memiliki banyak cabang atau DPC di Indonesia salah satunya DPC PKB Kabupaten Tulungagung yang bertempat

¹⁰ *Ibid.*, hal 31-32

¹¹ Dirga Ardina, et. all., *Transaksi Politik Warga* (Depok: Cakra Wikara Indonesia, 2018), hal 4

¹² Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik* (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995), hal 38-39

¹³ Verelladevanka Adryamarthanino & Widya Lestari Ningsih, Sejarah Berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), <https://www.kompas.com/stori/read/2022/01/19/130000979/sejarah-berdirinya-partai-kebangkitan-bangsa-pkb>, diakses tanggal 15 November 2024

di Jl. Letjend Suprpto No.112, Kepatihan, Kec. Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66219. Partai ini mampu menjadi salah satu paratai besar di Tulungagung dengan basis pemilih yang cukup banyak, dibuktikan dengan perolehan suara di DPRD Tulungagaung sejumlah 18% suara atau 9 kursi.¹⁴ Basis partai yang besar menjadikan PKB juga telah banyak ikut dalam upaya peningkatan sumber daya manusia seperti pendidikan politik.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan perspektif *al-darūriyāh*, *darūriyāt* atau *darūriyāh* adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atas disebut dengan kebutuhan primer. Yakni sesuatu yang sangat perlu dipelihara atau diperhatikan seandainya tidak atau terabaikan membawa kepada tidak ada atau tidak berartinya kehidupan. Bila tingkat kebutuhan itu tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun akhirat.¹⁵

Sebagai hal yang mendasar bagi manusia tuntutan kebutuhan bagi manusia itu bertingkat-tingkat, menurut al-Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu: *darūriyāt* (kebutuhan primer), *hajiyāt* (kebutuhan sekunder), dan *tahsīniyāh* (kebutuhan tertier).¹⁶ Lanjut menurut al-Syatibi ada 5 (lima) hal yang termasuk dalam kategori *darūriyāh*, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Untuk

¹⁴ Magang1 & Adrianus Adhi, Daftar Nama 50 Caleg DPRD Terpilih Kabupaten Tulungagung Jawa Timur Tahun 2024, <https://surabaya.tribunnews.com/2024/04/16/daftar-nama-50-caleg-dprd-terpilih-kabupatenupaten-tulungagung-jawa-timur-tahun-2024>, diakses tanggal 15 November 2024

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 240

¹⁶ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), Jilid 2, hal. 374

memelihara lima pokok inilah syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok di atas.

Dari fakta yang ada dilapangan lansia hanya dijadikan sebagai sarana untuk mendulang suara saja, mereka masih kurang sadar akan pentingnya partisipasi mereka terhadap PEMILU, eksploitasi suara terhadap lansia ini harus bisa dihilangkan terutama melalui pendidikan politik.

Dengan demikian latar belakang diatas cukup menjelaskan secara singkat tentang tujuan dan keinginan penulis untuk mengetahui seperti apa peran partai politik dalam membangun pendidikan politik bagi lansia di kabupatenupaten Tulungagung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok pertanyaan adalah:

1. Bagaimana PKB melakukan pendidikan politik bagi lansia di Tulungagung?
2. Bagaimana dampak dari pendidikan politik bagi lansia di Tulungagung?
3. Bagaimana pendidikan politik bagi lansia oleh partai politik dalam perspektif *maṣlaḥah al-ḍarūriyāh*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pendidikan politik yang dilakukan PKB bagi lansia di Tulungagung.
2. Untuk mengetahui dampak dari pendidikan politik.
3. Untuk mengetahui pendidikan politik bagi lansia oleh partai politik dalam perspektif *maṣlaḥah al-ḍarūriyāh*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasar fokus penelitian diatas, maka penelitian ini memiliki manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini diharap dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan terutama terkait judul ini bisa mampu berkontribusi terhadap partisipasi dan memberikan pemahaman berkaitan dengan pendidikan politik di Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memperluas keilmuan yang dapat dijadikan bahan bacaan, serta kepustakaan tentang peran partai politik di Indonesia sehingga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi suatu pemahaman baru terkait dengan pendidikan politik yang berdasarkan perspektif *maṣlahah al-ḍarūriyāh*.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, besar harapan dapat dijadikan bahan rujukan dan pertimbangan yang berkaitan dengan penelitian selanjutnya tentang pendidikan politik bagi lansia ditinjau dari segimanapun.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah digunakan dalam penelitian ini karena terdapat beberapa aspek penting yang harus dimengerti dengan baik yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, untuk mencegah adanya salah pengartian dari penguji maupun pembaca, serta untuk mempermudah pemahaman terhadap inti dari penulisan selanjutnya. Oleh karena itu, penulis memberikan penjelasan tentang istilah terkait peran partai politik dalam membangun pendidikan politik bagi lansia di Tulungagung dalam perspektif *maṣlahah al-ḍarūriyāh* maka disajikan istilah dalam penulisan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Partai Politik

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, tujuannya adalah untuk memperoleh kekuasaan politik, memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota partai politik, masyarakat, bangsa dan negara, serta merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional atau pemilihan umum dan menalankan pemerintahan sesuai dengan ideologi dan program kerja yang mereka usung.¹⁷

b. Pendidikan Politik

Pendidikan politik adalah segala sesuatu bentuk kegiatan yang berkaitan dengan urusan yang menyangkut kepentingan dari sekelompok atau individu masyarakat (negara) guna mengetahui hak-hak dan kewajibannya. Pendidikan politik merupakan proses mempengaruhi individu agar dia mendapatkan informasi, dan meningkatkan pemahaman atas hak, kewajiban, cara partisipasi yang aktif serta bisa menambah wawasan juga ketrampilan politik sehingga sanggup berfikir kritis serta lebih intesional terarah hidupnya dan ketika bersikap dia lebih bijaksana. Selain itu pendidikan politik bisa menjadikan warga negara yang lebih mantap, tidak terapung tanpa bobot dan tanpa pengaruh orientasi terhadap keadaan sendiri dan kondisi lingkungannya.¹⁸

¹⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal 404

¹⁸ Prabowo, *Pembelajaran Fisika Dengan Pendekatan Terpadu Dalam Menghadapi Perkembangan IPTEK Millenium III*. (Jakarta: Himpunan Fisika Indonesia, 2000), hal 4-5

c. Lansia

Lansia, atau lanjut usia, adalah orang yang telah mencapai usia tua juga dapat didefinisikan lansia sebagai masa di mana seseorang mengalami kemunduran seiring berjalannya waktu atau bertambahnya usia. Secara tradisional, masyarakat menganggap lansia sebagai orang yang telah berusia 65 tahun ke atas. Namun, menurut Undang-Undang No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas.¹⁹

d. *Al-Darūriyāh*

Kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemashlahatan seperti ini ada lima, yaitu; (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, (5) memelihara harta. Kelima kemashlahatan ini, disebut dengan *al-maṣāliḥ al-khamsah*.²⁰

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan peran penting dalam penelitian ini guna membatasi penelitian yang ingin dikaji dengan berjudul “Peran Partai Politik Dalam Membangun Pendidikan Politik bagi Lansia di Tulungagung dalam Perspektif *Maṣlahah Al-Darūriyāh* (Studi Kasus DPC PKB Kabupaten Tulungagung)”, yaitu penelitian yang mengkaji pada peran partai politik di bidang pendidikan politik bagi lansia yang dilaksanakan oleh DPC

¹⁹ UU No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia

²⁰ Zamzami, Memeliharaal-Dharuriyah Al-Khamsah dalam Menetapkan Hukum pada Tatanan Perubahan Sosial, *Jurnal Ilmiah Mizani*, vol 3, no 2 2016, hal 1

PKB Kabupatenupaten Tulungagung yang selanjutnya dianalisis dengan perspektif *maṣlahah al-ḍarūriyāh*.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini berisi tentang bagian awal dari penelitian seperti pendahuluan pada bab ini akan memaparkan seperti; rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan terkait dengan judul yang akan dibahas oleh peneliti.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini berkaitan dengan kajian teori yang berkaitan dengan pendidikan politik untuk lansia. Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar hukum terkait dengan Pendidikan Politik, Partai Politik, Lansia, Partai Kebangkitan Bangsa, dan *Maṣlahah Al-Darūriyāh*.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini memuat tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian terkait dengan Pendidikan Politik Bagi Lansia. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dilokasi penelitian kemudian melakukan wawancara yang dilakukan secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian ini disebut penelitian *Field reasearch* dengan pendekatan studi kasus (*case approach*). Pada bab ini juga berisi tentang lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber serta bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, pada penelitian ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan ketika melaksanakan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung pada tempat penelitian terkait Pendidikan Politik Bagi Lansia. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal

berikutnya memaparkan temuan saat melakukan penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Pada paparan data berisi seperti, bentuk pendidikan politik bagi lansia yang dilakukan oleh DPC PKB Kabupaten Tulungagung, dampak pendidikan politik, peran partai politik dalam membangun pendidikan politik dan kendala dari pendidikan politik.

Bab V Pembahasan, kemudian dalam bab ini berisi tentang pembahasan, pada bab ini penulis akan menulis mengenai pembahasan atau analisis data yang telah didapatkan seaktu penelitian, selanjutnya data yang didapat akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis diskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian yang telah dirumuskan diawal dimana akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian mengenai Pendidikan Politik Bagi Lansia Oleh DPC PKB di Tulungagung Dalam Perspektif *Maṣlahah Al-Darūriyāh*.

Bab VI Penutup, pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan Pendidikan Politik Bagi Lansia Oleh DPC PKB di Tulungagung. Kemudian juga mencangkup saran yang diberikan oleh peneliti terkait dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.